

**KEABSAHAN ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN LINDUNG KAWASAN
TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI HUTAN
PRODUKSI TETAP UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN**

TESIS



Oleh :
KRISNO JATMIKO
156010100111008

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MAGISTER ILMU HUKUM
MALANG
2017

TESIS

Judul :

**KEABSAHAN ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN LINDUNG KAWASAN TUMPANG
PITU KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP UNTUK
KEGIATAN PERTAMBANGAN**

Oleh :

Krisno Jatmiko

NIM. 156010100111008

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 1 November 2017
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing

Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum.
Ketua

Dr. Istislam, S.H.,M.Hum.
Anggota

Malang,

**Universitas Brawijaya
Pascasarjana Ilmu Hukum
Dekan**

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Istislam, S.H.,M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 01 November 2017
Mahasiswa



Nama : Krisno Jatmiko
Nim : 156010100111008
PS : Magister Ilmu Hukum
FH UB

RINGKASAN

Krisno Jatmiko, Hukum Penyelenggaraan Negara, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, November 2017, KEABSAHAN ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN LINDUNG KAWASAN TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN, Dr. Iwan Permadi S.H., M.Hum, Dr Istislam S.H., Mhum.

Pada Tesis ini, penulis mengangkat masalah tentang alih fungsi lahan hutan lindung kawasan tumpang pitu Kabupaten Banyuwangi. Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh timbulnya bencana banjir pasca alih fungsi lahan hutan lindung. Karena pengalih fungsian lahan memiliki sayarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara hukum mengandung kecacatan dan secara lingkungan akan menimbulkan dampak bencana.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana keabsahan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 826/Menhut-II/2013 tentang alih fungsi kawasan hutan Tumpang Pitu seluas 1946 Ha ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? (2) Bagaimana akibat hukum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 826/Menhut-II/2013 tentang alih fungsi kawasan hutan Tumpang Pitu yang mengandung cacat yuridis selama belum ada putusan pembatalan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara?

Penulisan Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian menggunakan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban bahwa SK Nomor 826/Menhut-II/2013 mengandung kecacatan yuridis yang telah diuji keabsahannya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena secara substansi melanggar beberapa Undang-

undang, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, juga Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Alih Fungsi, Keabsahan.

SUMMARY

Krisno Jatmiko, The Law of State Administration, Master of Law Science Brawijaya University, November 2017, VALIDITY FUNCTIONAL CHANGES OF PROTECTED FOREST TUMPANG PITU IN REGENCY OF BANYUWANGI AREA BEING PRODUCTION FORESTS FOR MINING ACTIVITIES, Dr. Iwan Permadi S.H., M.Hum, Dr Istislam S.H., Mhum.

On this thesis, author raised the issue of functional changes of protected forest Tumpang Pitu in Regency of Banyuwangi Area. The choice, backed by the emergence of flood disasters post-conversion of protected forest land. Because the land transfer function has conditions which is governed by law and if such conditions are not met then legally contain defects and environmentally will cause disaster.

Based on the background above, this thesis raised the problem formulation: (1) How is the validity of the decree Minister of Forestry Number: 827/Menhut-II/2013 about over function of forest area Tumpang Pitu covering an area of 1946 Ha in terms of Legislation related to protection and management of the environment? (2) How the legal consequences Decree of the Minister of Forestry Number: 826/Menhut-II/2013 about over function of forest area Tumpang Pitu which contains juridical defects as long as there is no decision on cancellation by the State Administrative Court?

The writing of this thesis uses normative research type with the method of legislation approach and concept approach method. This research uses primary and secondary law.

From the research using the above method, author get answer that Decree number 826/Menhut-II/2013 contains juridical defects which has been tested for its validity under the Constitution number 5, 1986 about the State Administrative Court because it substantially violates several laws, Constitution number 4, 2009 about Mineral and Coal Mining, also Constitution number 32, 2009 about Environmental Protection and Management.

Keywords: State Administrative Court, Decision of State Administration, Functional Changes, Validity.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafaat, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Iwan Permadi S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Istislam SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
4. Kedua Orang Tua, Bapak Sugeng Munarso dan ibunda tercinta Wahyuni Mursiani, terima kasih atas doa dan dukungannya, baik moril maupun materiil. Beliau adalah malaikat yang dikirim oleh ALLAH SWT serta anugrah terindah bagiku. Terima kasih atas kasih sayang yang selama ini telah

dicurahkan untukku. Semoga anakmu ini bisa menjadi anak yang kelak akan membanggakan dan membahagiakanmu.

5. Kedua orang tua baruku, bapak Riyanto dan ibu Maimunah terima kasih atas suport kalian selama ini, terima kasih pula atas kasih sayang yang telah diberikan untukku.
6. Orang-orang tersayangku, Ita Nurhasanah terima kasih atas bantuan dan kesabaran yang telah diberikan untukku serta dukungan yang tiada henti, dan si Ganteng dan yang paling lucu dan cerdas Cakra Krisna Al ayyubi yang telah menemani dan memberikan semangat kepadaku dan memotifasi untuk tetap bertahan dan tetap bersemangat untuk menggapai cita-cita.
7. Adik-adikku tersayang Uliya Nurjannah. Elita Nur Holifa dan Anisa Triyoga terima kasih atas dukungan kalian semua.
8. Sahabat-sahabat terbaik, Aditya Swastika, Andi Inar Sahabat, dan Geibi Amanda Alow.
9. Teman-teman seperjuangan MIH UB angkatan 2015 semuanya.
10. Keluarga di Malang, teman-teman kos Jalan Gajayana 22A (Yoga A, Anton Kapten, Wahab, Fatah B, Wildan L, Shidiq A, Ali F, Sukma, Ifan A, Gilang F, Lukman Lok, Toni K, Theo S, Agus Mbambang, Fajar S, Rochsi S, M Rozy, Khoirul H, Virly F, Lendy, Utsman, Ryan, Ilham).

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun selama penulisan

Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Malang, November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN RINGKASAN	v
HALAMAN <i>SUMMARY</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritik	10
1.6 Orisinalitas Penelitian	24
1.7 Metode Penelitian	25
1.8 Desain Penelitian	29
1.9 Sistematika Penulisan	30

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keputusan Tata Usaha Negara	31
2.1.1 Definisi	31
2.1.2 Syarat-syarat Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara	33
2.2 Peradilan Tata Usaha Negara.....	35
2.2.1 Kedudukan dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara	36
2.2.1 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	37
2.3 Hutan	38
2.3.1 Perencanaan Kehutanan	43
2.3.2 Status, Fungsi, dan Pengurusan Hutan	48
2.3.3 Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	58

2.3.4 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	59
2.4 Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara	73
2.4.1 Definisi	73
2.4.2 Wilayah Pertambangan	76
2.4.3 Izin Usaha Pertambangan	78
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Menguji KTUN menggunakan Pendekatan Perundang-undangan	81
3.1.1 Prosedur	81
3.1.2 Kewenangan	93
3.1.3 Substansi/materiil	102
1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH	110
2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	114
3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	121
4 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba	126
3.2 Akibat Hukum Surat Keputusan Nomor 826/Menhut-II/2013	129
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	142
4.2 Saran	142
 DAFTAR PUSTAKA	 144